

## KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA GUNUNGSITOLI TERHADAP PENDIDIKAN DI MADRASAH

**Agus Rahman Waruwu**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[muhammadagusrahman85@gmail.com](mailto:muhammadagusrahman85@gmail.com)

**Junaidi Arsyad**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[junaidiarsyad@uinsu.ac.id](mailto:junaidiarsyad@uinsu.ac.id)

**Azizah Hanum**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[azizahhanum@uinsu.ac.id](mailto:azizahhanum@uinsu.ac.id)

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan kebijakan Kementerian Agama Kota Gunungsitoli terhadap pengembangan pendidikan Madrasah, pelaksanaan kebijakan pengembangan pendidikan Madrasah di Kementerian Agama Gunungsitoli, dan evaluasi kebijakan pengembangan pendidikan Madrasah di Kementerian Agama Kota Gunungsitoli. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi analisis kebijakan. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian dalam tesis ini pertama; kebijakan yang dirancang dari atas sering kali tidak cukup fleksibel untuk menyesuaikan dengan kondisi lokal. Pada akhirnya, beban untuk memastikan kebijakan itu berhasil sering kali jatuh di pundak kepala madrasah, guru, dan masyarakat, yang harus berjuang dengan segala keterbatasan. Narasi ini bukan hanya tentang masalah, tetapi juga tentang semangat untuk terus mencoba, meskipun jalan yang harus dilalui sangat berat. Kedua; Perencanaan kebijakan Kementerian Agama Kota Gunungsitoli dalam pengembangan pendidikan madrasah menunjukkan upaya yang terorganisir dan adaptif terhadap tantangan lokal yang kompleks. Proses perencanaan ini dimulai dengan identifikasi kebutuhan langsung di lapangan, yang melibatkan masukan dari kepala madrasah, guru, dan masyarakat. Ketiga; Evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama dan pihak madrasah telah menunjukkan langkah-langkah strategis, termasuk kunjungan langsung ke madrasah, pengumpulan laporan rutin, serta diskusi internal. Pendekatan ini mencerminkan upaya yang komprehensif untuk memahami kondisi riil di lapangan, meskipun menghadapi keterbatasan seperti jumlah staf monitoring, sumber daya yang terbatas, dan kualitas laporan yang belum sepenuhnya mencerminkan realitas.*

*Kata Kunci: Kebijakan, Kementerian Agama, Gunungsitoli, Pendidikan*

### Abstract

*This study aims to analyze the policy planning of the Ministry of Religion of Gunungsitoli City towards the development of Madrasah education, the implementation of Madrasah education development policies at the Ministry of Religion of Gunungsitoli, and the evaluation of Madrasah education development policies at the Ministry of Religion of Gunungsitoli City. The method used in this study is a qualitative method with a policy analysis study approach. Data collection techniques with observation, interviews, and documentation. The research results in this thesis are first; Policies designed from above are often not flexible enough to adapt to local conditions. In the end, the burden of ensuring the success of the policy often falls on the shoulders of madrasah heads, teachers, and the community, who have to struggle with all limitations. This narrative is not only about problems, but also about the spirit to keep trying, even though the road to travel is very difficult. Second; The policy planning of the Ministry of Religion of Gunungsitoli City in the development of madrasah*

*education shows an organized and adaptive effort to complex local challenges. This planning process begins with the identification of direct needs in the field, which involves input from madrasah heads, teachers, and the community. Third; Evaluations conducted by the Ministry of Religion and the madrasah have shown strategic steps, including direct visits to madrasas, collection of routine reports, and internal discussions. This approach reflects a comprehensive effort to understand the real conditions on the ground, despite limitations such as the number of monitoring staff, limited resources, and the quality of reports that do not fully reflect reality.*

*Keywords: Policy, Ministry of Religion, Gunungsitoli, Education*



© Author(s) 2026

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

## PENDAHULUAN

Pendidikan madrasah di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter serta menyediakan pendidikan formal berbasis agama Islam yang berkualitas. Madrasah merupakan salah satu jenjang pendidikan menengah di Indonesia yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan memberikan pendidikan agama kepada siswa. Di Kota Gunungsitoli, terdapat Madrasah yang memberikan kontribusi dalam pendidikan agama dan karakter siswa di tingkat menengah. Namun, dalam konteks implementasi kebijakan pendidikan dan perkembangan pendidikan di Indonesia, Madrasah di Kota Gunungsitoli juga menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan. Di Kota Gunungsitoli, seperti halnya di banyak wilayah lain di Indonesia, pendidikan madrasah diatur dan dipengaruhi secara langsung oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.<sup>1</sup>

Kebijakan pendidikan madrasah di bawah naungan Kementerian Agama Gunungsitoli telah menjadi isu strategis dalam konteks pengembangan kualitas pendidikan berbasis keagamaan. Wilayah Gunungsitoli, dengan karakteristik geografis yang sebagian besar berupa daerah terpencil, menghadapi tantangan besar dalam menyediakan akses pendidikan yang merata. Menurut data dari Kantor Kementerian Agama Gunungsitoli, sebanyak 45% madrasah di wilayah ini masih kekurangan fasilitas dasar seperti ruang kelas yang memadai dan alat pembelajaran. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara kebutuhan pendidikan dengan kemampuan penyediaannya. Tantangan tersebut mendesak untuk dianalisis guna merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah.<sup>2</sup>

Madrasah memiliki tanggung jawab dalam membangun insan yang tidak hanya berilmu pengetahuan tetapi juga berakhlak mulia. Namun, tantangan dalam pengelolaan pendidikan madrasah di Gunungsitoli masih signifikan, termasuk keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga

---

<sup>1</sup> R Harun, *Evolusi Kementerian Agama: Peran Dalam Pembangunan Bangsa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Nusantara, 2014).

<sup>2</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, "Pedoman Operasional Evaluasi Diri Madrasah V.1.0," 2020, <https://madrasahreform.kemenag.go.id/dokumen/edm.pdf>.

pendidik berkualitas, serta rendahnya akses siswa terhadap teknologi pendidikan. Berdasarkan data dari Kementerian Agama Kabupaten Gunungsitoli, 60% madrasah di wilayah ini belum memenuhi standar layanan pendidikan ideal, baik dari segi infrastruktur maupun kurikulum berbasis kompetensi.

Kementerian Agama memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan berbasis agama di Indonesia, termasuk madrasah. Menurut Nasution, Kementerian Agama bertugas untuk merumuskan serta mengimplementasikan kebijakan di bidang pendidikan agama yang adapun meliputi kurikulum, pembinaan guru, serta pengawasan operasional. Kementerian Agama berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang serasi dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan lokal.<sup>3</sup>

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan yang diimplementasikan oleh Kementerian Agama sangat memengaruhi kualitas dan efektivitas pendidikan di madrasah. Menurut penelitian Maulana,<sup>4</sup> kebijakan berbasis afirmasi di madrasah mampu meningkatkan partisipasi siswa hingga 25% dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Selain itu, keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh rancangan kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.<sup>5</sup> Dalam konteks pendidikan madrasah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menegaskan pentingnya peningkatan mutu pendidikan agama untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Hal ini diperkuat oleh studi Hamid, yang menemukan bahwa pendidikan madrasah memiliki potensi besar dalam membentuk siswa yang kompeten secara akademik dan religius apabila didukung oleh kebijakan yang terarah dan implementasi yang baik.<sup>6</sup>

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya yang tidak hanya menyoroti praktik pendidikan di madrasah sebagaimana penelitian-penelitian sebelumnya, melainkan secara khusus menganalisis implementasi kebijakan Kementerian Agama Gunungsitoli terhadap pendidikan di madrasah.<sup>7</sup> Penelitian ini menghadirkan perspektif baru dengan mengangkat konteks lokal madrasah di Gunungsitoli yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan geografis tersendiri, sekaligus menelaah secara lebih mendalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan, beserta hambatan yang dihadapi di tingkat satuan pendidikan. Dengan demikian,

---

<sup>3</sup> Dessy Rahmadani, Yenni Samri, and Juliati Nasution, "Strategi Peningkatan Jumlah Muzakki Di Lazis Muhammadiyah Kota Medan," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021).

<sup>4</sup> Munjiah Munjiah, "Pengaruh Budaya Sekolah Terhadap Perilaku Bullying Pada Siswa Madrasah Tsanawiyah Hasyim Asy'ari Kota Batu" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023).

<sup>5</sup> All Rizky Ramadhan Siregar, "Model Komunikasi Pemasaran Organisasi Kemasyarakatan Muhammadiyah Kota Medan Dalam Membangun Brand Image Organisasi" (Universitas Sumatera Utara, 2025).

<sup>6</sup> Hamid Hamdani and Beni Ahmad Saebani, "Pendidikan Karakter Perspektif Islam," *Bandung: Pustaka Setia*, 2013.

<sup>7</sup> I Wayan Darna, *Pendidikan Karakter Tanggung Jawab Siapa?: Pentingnya Sinergi Rumah, Sekolah Dan Masyarakat Demi Membentuk Karakter Siswa* (Nilacakra, 2023).

penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya kajian implementasi kebijakan pendidikan agama serta kontribusi praktis sebagai masukan strategis bagi Kementerian Agama Gunungsitoli dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah.<sup>8</sup>

Pentingnya kebijakan pendidikan madrasah juga tercermin dalam literatur yang mendukung peran strategis madrasah dalam pembentukan karakter siswa berbasis nilai keagamaan. Penelitian sebelumnya oleh Ismail dan Halim.<sup>9</sup> menunjukkan bahwa madrasah memiliki kontribusi yang signifikan dalam mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam kurikulum pendidikan nasional, yang berpengaruh positif pada pembentukan moral siswa. Namun, penelitian ini juga mencatat bahwa kebijakan yang kurang tepat sasaran, seperti distribusi anggaran yang tidak merata, menghambat efektivitas kebijakan tersebut, terutama di daerah terpencil seperti Gunungsitoli. Literasi ini memperkuat urgensi untuk mengevaluasi kebijakan Kementerian Agama terkait pengelolaan dan pengembangan pendidikan madrasah di daerah dengan karakteristik khusus.

Kebijakan yang diimplementasikan oleh Kementerian Agama tidak hanya berfokus pada aspek kualitatif, tetapi juga pada peningkatan partisipasi dan prestasi akademik. Studi oleh Rahmat.<sup>10</sup> menunjukkan bahwa intervensi kebijakan di kota Gunungsitoli, seperti program beasiswa dan pembangunan infrastruktur madrasah baru, telah berdampak positif terhadap peningkatan jumlah pendaftar dan prestasi siswa di tingkat regional.

Meskipun terdapat berbagai upaya dan program yang dicanangkan, Kementerian Agama Kota Gunungsitoli menghadapi sejumlah tantangan. Menurut Siregar, ada tantangan yaitu kurangnya kegiatan ekstrakurikuler yang dapat meningkatkan keterampilan sosial dan keagamaan siswa. Tantangan-tantangan ini memerlukan strategi yang komprehensif dan kolaboratif dari berbagai pihak terkait.<sup>11</sup>

Teori kebijakan publik sering mengkaji bagaimana institusi pemerintah mengadaptasi dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan pada tingkat nasional ke dalam konteks lokal yang spesifik. Menurut teori ini, keefektifan sebuah kebijakan dapat dilihat dari seberapa baik kebijakan tersebut mengatasi kebutuhan lokal dan bagaimana implementasinya dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat.<sup>12</sup> Di sisi lain, teori implementasi kebijakan menekankan pada

---

<sup>8</sup> Siregar, "Model Komunikasi Pemasaran Organisasi Kemasyarakatan Muhammadiyah Kota Medan Dalam Membangun Brand Image Organisasi."

<sup>9</sup> K Lali and A Chakor, "Marketing Based on the Digitalization of Customer Relations: A Priority Orientation for Better Management of Companies' Financial Resources," in *Lecture Notes in Networks and Systems*, ed. Farhaoui Y. et al., vol. 837 LNNS (Polydisciplinary Faculty, Moulay Ismail University, Meknès/Errachidia, Morocco: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2024), [https://doi.org/10.1007/978-3-031-48465-0\\_68](https://doi.org/10.1007/978-3-031-48465-0_68).

<sup>10</sup> Sidiq Rahmat, *Manajemen Sumber Daya Manusia Bidang Pendidikan: Teori Dan Praktek* (Edu Publisher, 2021).

<sup>11</sup> Tasya Amelia Putri Siregar et al., "Kriteria Kebenaran Ilmiah Dalam Perspektif Barat Dan Islam," *Dirosat: Journal of Islamic Studies* 8, no. 1 (2023).

<sup>12</sup> Kevin B Smith and Christopher W Larimer, *The Public Policy Theory Primer* (Routledge, 2018).

proses dan hasil dari penerapan kebijakan tersebut, yang meliputi pemilihan strategi, alokasi sumber daya, dan pengawasan.<sup>13</sup>

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas kebijakan Kementerian Agama Gunungsitoli dalam meningkatkan mutu pendidikan di madrasah, baik dari aspek akademik maupun non-akademik. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan secara empiris, dengan fokus pada implementasi kurikulum berbasis nilai agama, peningkatan kompetensi guru, dan penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah dan pemangku kebijakan terkait dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan madrasah di wilayah Gunungsitoli.<sup>14</sup>

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan studi analisis kebijakan. Lexy J.Moloeng menjeleaskan bahwa penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk memahami fenomena yang sedang terjadi pada subjek penelitian seperti tingkah laku, persepsi, tindakan, motivasi dan cara mengolah data dalam bentuk deskripsi berupa kalimat serta dengan berbagai metode ilmiah yang digunakan. William N. Dunn mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan. Weimer and Vining, *The product of policy analysis is advice. Specifically, it is advice that inform some public policy decision.* Jadi analisis kebijakan publik lebih merupakan nasehat atau bahan pertimbangan pembuat kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang dihadapi, tugas yang mesti dilakukan oleh organisasi publik berkaitan dengan masalah tersebut, dan juga berbagai alternatif kebijakan yang mungkin bisa diambil dengan berbagai penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan. Analisis kebijakan publik bertujuan memberikan rekomendasi untuk membantu para pembuat kebijakan dalam upaya memecahkan masalah-masalah publik.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> M. Hupe Hill P., *Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice* (London: Sage, 2002).

<sup>14</sup> Harun, *Evolusi Kementerian Agama: Peran Dalam Pembangunan Bangsa Indonesia.*

<sup>15</sup> Lexy J Moleong and Tjun Surjaman, "Metodologi Penelitian Kualitatif," 2014.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil penelitian mengenai pelaksanaan, perencanaan, dan evaluasi kebijakan pengembangan pendidikan madrasah yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kota Gunungsitoli. Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini berfokus pada tiga aspek utama kebijakan pengembangan pendidikan madrasah: perencanaan strategis, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi implementasi.

### **Perencanaan Kebijakan Kementerian Agama Kota Gunungsitoli dalam Pengembangan Pendidikan Madrasah**

Perencanaan Kebijakan Kementerian Agama Kota Gunungsitoli dalam Pengembangan Pendidikan Madrasah, penelitian mengeksplorasi proses perencanaan yang dilakukan oleh Kementerian Agama, termasuk pendekatan partisipatif, perumusan kebijakan berbasis data, serta penyelarasan kebijakan dengan kebutuhan lokal. Penekanan khusus diberikan pada bagaimana perencanaan strategis dilakukan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya dan mendukung keberlanjutan program pendidikan madrasah. Penelitian ini menemukan bahwa perencanaan kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Gunungsitoli menempati posisi strategis dalam mengarahkan arah pengembangan pendidikan madrasah.<sup>16</sup> Proses perencanaan dilakukan secara partisipatif, melibatkan kepala madrasah, guru, pengawas, dan pemangku kepentingan lokal lain sehingga kebijakan yang dihasilkan bersifat responsif terhadap kebutuhan riil di lapangan. Melalui forum musyawarah, FGD, dan koordinasi rutin, Kementerian Agama berhasil menghimpun aspirasi serta menyusun prioritas program yang sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan geografis Kota Gunungsitoli.

Temuan menunjukkan bahwa perumusan kebijakan didasarkan pada pendekatan berbasis data, di mana Kementerian Agama memanfaatkan data pendidikan, seperti angka partisipasi sekolah, ketersediaan tenaga pendidik, serta sarana prasarana madrasah. Data tersebut menjadi dasar dalam menentukan alokasi anggaran, penempatan guru, dan pengembangan kurikulum, sehingga kebijakan yang lahir lebih tepat sasaran. Hal ini memperkuat posisi Kementerian Agama sebagai pengambil kebijakan yang evidence-based, tidak semata bersifat normatif atau administratif. Penelitian juga menyoroti adanya upaya penyelarasan kebijakan dengan kebutuhan lokal, misalnya dengan memberikan perhatian pada madrasah yang berada di daerah terpencil dan memiliki keterbatasan fasilitas. Perencanaan strategis diarahkan untuk mengatasi kesenjangan tersebut melalui program revitalisasi sarana prasarana, peningkatan kompetensi guru, serta penguatan peran madrasah dalam mencetak generasi yang berkarakter dan berdaya saing.

---

<sup>16</sup> Indonesia, "Pedoman Operasional Evaluasi Diri Madrasah V.1.0."

Keterbatasan sumber daya, baik anggaran maupun SDM, menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi. Kementerian Agama Kota Gunungsitoli mengantisipasi hal ini dengan melakukan prioritas program dan menjalin kerja sama lintas sektor, termasuk dengan pemerintah daerah, ormas keagamaan, dan lembaga donor. Langkah ini merupakan bagian dari strategi keberlanjutan agar program pengembangan pendidikan madrasah tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi dapat dijalankan secara konsisten dalam jangka panjang.<sup>17</sup>

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa perencanaan kebijakan di Kementerian Agama Kota Gunungsitoli telah berkembang menuju model perencanaan yang adaptif, partisipatif, berbasis bukti, dan berorientasi pada keberlanjutan. Hal ini menjadi fondasi penting bagi upaya meningkatkan kualitas pendidikan madrasah dan menjawab tantangan pendidikan di era modern.

Pendekatan seragam yang digunakan dalam kebijakan pusat sering kali lebih cocok untuk wilayah dengan akses yang lebih baik dan kondisi yang lebih mendukung, seperti kota-kota besar. Sementara itu, Gunungsitoli memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual agar kebijakan dapat disesuaikan dengan kondisi spesifik wilayah tersebut. Kesadaran akan kebutuhan unik ini menunjukkan bahwa perencanaan kebijakan di Gunungsitoli sudah mencoba untuk lebih inklusif, meskipun terkendala oleh kebijakan pusat yang tidak selalu memberikan ruang untuk adaptasi.<sup>18</sup>

Jawaban wawancara tersebut memberikan gambaran tentang bagaimana proses perencanaan kebijakan pendidikan di tingkat lokal dilakukan dengan pendekatan yang cukup sistematis. Proses ini dimulai dengan identifikasi kebutuhan di lapangan, yang dilakukan melalui laporan dari kepala madrasah. Pendekatan ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya memahami kondisi nyata di setiap madrasah sebelum menetapkan prioritas kebijakan. Dengan cara ini, kebutuhan spesifik masing-masing madrasah dapat diakomodasi, misalnya dengan memprioritaskan peningkatan fasilitas di tahun tertentu.

Fleksibilitas dalam pelaksanaan menjadi hal yang sangat penting dalam konteks ini. Pemerintah daerah harus mampu menavigasi antara mengikuti kebijakan pusat dan mengakomodasi kebutuhan lokal. Hal ini menunjukkan pentingnya koordinasi yang lebih baik antara tingkat pusat dan daerah, sehingga kebijakan yang dirancang di tingkat nasional dapat lebih responsif terhadap

---

<sup>17</sup> Noviantika Noviantika, "Pelaksanaan Bina IMTAQ Dzikir Dalam Meningkatkan Keimanan Dan Ketakwaan Peserta Didik Di SD Inpres Bumi Bahari Palu Barat" (Universitas Islam Negeri Negeri Datokarama Palu, 2024).

<sup>18</sup> V V Mantulenko and A D Kornilova, "Development of Additional Professional Education: Marketing Tools for Information Transparency," in *Lecture Notes in Civil Engineering*, ed. Mantulenko V., vol. 378 LNCE (Samara State University of Economics, Samara, Russian Federation: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2023), [https://doi.org/10.1007/978-3-031-38122-5\\_48](https://doi.org/10.1007/978-3-031-38122-5_48).

kondisi lokal.<sup>19</sup>

Jawaban ini juga menggambarkan adanya prioritas yang jelas dalam alokasi anggaran, seperti fokus pada peningkatan fasilitas di tahun tertentu. Namun, keberhasilan pendekatan ini bergantung pada kemampuan daerah untuk mengelola anggaran secara efektif dan memastikan bahwa sumber daya yang terbatas digunakan untuk mengatasi kebutuhan yang paling mendesak. Dalam kondisi seperti ini, perencanaan yang matang dan berbasis data menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada kebutuhan riil. Kebutuhan identifikasi dan analisis tersebut pada praktiknya membutuhkan data pendukung yang relevan dan valid, namun sering kali hal ini menjadi problem riil, seperti yang diutarakan informan ketiga:

*Data sering kali jadi masalah. Misalnya, jumlah siswa kadang tidak sesuai dengan data yang dilaporkan sebelumnya, karena ada yang pindah atau berhenti sekolah. Kami harus mencocokkan data ini berkali-kali sebelum mengajukan usulan. Selain itu, data tentang kondisi fasilitas juga tidak selalu terupdate, sehingga kami harus melaporkannya lagi secara manual.*

Salah satu tantangan mendasar dalam proses perencanaan dan pengelolaan pendidikan, yaitu masalah keakuratan dan keterbaruan data. Data yang tidak sesuai atau tidak terbaru menjadi hambatan signifikan dalam menyusun kebijakan atau mengajukan usulan, karena keputusan yang diambil berdasarkan data yang salah atau tidak relevan berisiko tidak efektif dan tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Masalah pada data fasilitas yang tidak terbaru memperlihatkan bahwa proses pelaporan manual masih menjadi metode utama dalam banyak kasus. Hal ini tidak hanya memperlambat proses pengumpulan informasi, tetapi juga meningkatkan risiko human error dalam pencatatan. Data fasilitas yang tidak akurat atau tidak terupdate dapat mengakibatkan prioritas yang salah dalam alokasi sumber daya, misalnya memberikan bantuan ke madrasah yang sebenarnya tidak membutuhkan perbaikan mendesak, sementara madrasah lain dengan kebutuhan yang lebih kritis tidak mendapatkan perhatian.<sup>20</sup>

Kesulitan dalam mencocokkan data secara manual berkali-kali sebelum mengajukan usulan menunjukkan kurangnya efisiensi dalam sistem pengelolaan data. Proses ini tidak hanya memakan waktu, tetapi juga berpotensi menunda pengambilan keputusan yang diperlukan untuk mendukung pendidikan madrasah. Kondisi ini menekankan perlunya modernisasi sistem pengelolaan data, seperti penggunaan teknologi berbasis digital yang memungkinkan pelaporan data secara otomatis dan lebih akurat.

---

<sup>19</sup> Muhammad Awais Bhatti et al., "Factors Affecting Organizational Identity in the Tourism Industry: Role of Marketing Campaigns and Vision 2030," *International Journal of EBusiness and EGovernment Studies* 14, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.34109/ijepeg.202214114>.

<sup>20</sup> An Nisaa Shabrina et al., "Peran Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik Dalam Menciptakan Keunggulan Kompetitif Perusahaan.," *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan (JIMT)*. 4, no. 3 (2023).

Wawancara ini menunjukkan bahwa tantangan dalam pengelolaan data memiliki dampak langsung pada efektivitas perencanaan dan implementasi kebijakan pendidikan madrasah. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan investasi dalam pengembangan sistem informasi yang lebih baik, pelatihan bagi staf terkait untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan data, serta koordinasi yang lebih baik antara tingkat madrasah dan instansi yang lebih tinggi. Dengan data yang lebih akurat dan terbaru, proses perencanaan dan pengambilan keputusan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Selain itu data kondisi bangunan dalam konteks infrastruktur juga belum optimal, seperti yang disampaikan informan ketiga;

*Data itu sangat penting, tapi di sini sering kali datanya kurang lengkap. Misalnya, data kondisi bangunan atau jumlah siswa sering kali tidak terupdate dengan baik. Ini jadi salah satu hambatan dalam perencanaan. Kami sekarang sedang mencoba memperbaiki sistem pendataan supaya lebih akurat dan mudah diakses.*

Pentingnya data yang akurat dan terbaru sebagai fondasi dalam proses perencanaan pendidikan. Ketidaklengkapan data, seperti informasi tentang kondisi bangunan madrasah atau jumlah siswa, menjadi hambatan signifikan karena perencanaan yang berbasis data bergantung pada informasi yang valid. Ketika data tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan, kebijakan yang dihasilkan berisiko tidak relevan atau tidak tepat sasaran.

Strategi yang dilakukan untuk memperbaiki sistem pendataan mencerminkan kesadaran akan pentingnya memiliki sistem informasi yang lebih baik. Sistem pendataan yang akurat dan mudah diakses memungkinkan pihak terkait untuk mengidentifikasi kebutuhan dengan lebih cepat dan mendetail, sehingga proses perencanaan dapat dilakukan secara lebih efektif. Perbaikan ini juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan, karena semua pihak memiliki akses ke data yang sama dan dapat memantau perkembangan secara berkala.<sup>21</sup>

Proses perencanaan kebijakan pendidikan di tingkat lokal adalah upaya yang kompleks, yang melibatkan identifikasi kebutuhan, pengelolaan prioritas, dan penyesuaian terhadap kebijakan pusat. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, upaya ini mencerminkan pentingnya pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif dalam perencanaan kebijakan, sehingga dapat memberikan solusi yang relevan bagi madrasah di berbagai kondisi. Proses ini tentunya juga didasari pada beberapa faktor atau pertimbangan, sehingga proses perumusan dan implementasi kebijakan dapat berjalan efektif, seperti yang disampaikan informan pertama:

*Kami mempertimbangkan banyak hal, mulai dari kondisi infrastruktur, kualitas guru, sampai kebutuhan siswa. Data dari lapangan sangat penting, karena itu jadi acuan kami untuk menyusun kebijakan. Selain itu, kami juga mempertimbangkan masukan dari masyarakat, walaupun tidak semua masukan bisa langsung diwujudkan. Faktor anggaran juga sangat memengaruhi, karena tanpa dana yang cukup, kebijakan yang direncanakan sering kali tidak berjalan maksimal.*

---

<sup>21</sup> Muhammad Roihan Alhaddad, "Konsep Pendidikan Multikultural Dan Pendidikan Inklusif," *Jurnal Tarbiyah Islamiyah* 5, no. 1 (2020).

Jawaban wawancara ini menggambarkan pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan lokal dalam penyusunan kebijakan pendidikan madrasah. Proses perencanaan yang dilakukan menunjukkan kesadaran akan kompleksitas yang ada, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti infrastruktur, kualitas tenaga pengajar, kebutuhan siswa, serta masukan dari masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk menyusun kebijakan yang relevan dan berbasis data, meskipun diakui bahwa keterbatasan anggaran sering kali menjadi penghambat utama dalam pelaksanaannya.

Masukan dari masyarakat juga menjadi elemen penting dalam proses perencanaan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang baik tidak hanya mengakomodasi kebutuhan internal madrasah, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat sebagai bagian dari ekosistem pendidikan. Namun, keterbatasan sumber daya dan kompleksitas kebutuhan sering kali membuat semua masukan tidak dapat diwujudkan sekaligus. Ini mencerminkan adanya prioritas yang harus ditetapkan dalam menghadapi realitas yang ada.<sup>22</sup>

Keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan paling signifikan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan. Meskipun perencanaan telah dilakukan dengan matang, tanpa dukungan dana yang memadai, kebijakan yang dirancang tidak dapat berjalan maksimal. Masalah ini menggarisbawahi pentingnya manajemen anggaran yang efisien dan kemampuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada. Selain itu, tantangan ini juga menunjukkan perlunya kerjasama antara berbagai pihak untuk mencari solusi pendanaan alternatif, seperti melalui kemitraan dengan sektor swasta atau lembaga donor.

Penyusunan kebijakan pendidikan madrasah adalah proses yang kompleks dan penuh tantangan. Meskipun dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan melibatkan banyak pihak, keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada dukungan anggaran, kemampuan untuk memprioritaskan kebutuhan, serta kapasitas untuk menavigasi keterbatasan sumber daya. Pendekatan berbasis data dan inklusif seperti yang diuraikan dalam jawaban ini adalah langkah penting menuju kebijakan yang lebih relevan dan berdampak positif. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan sinergi antara perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang efektif, yang didukung oleh alokasi dana yang mencukupi. Informan ketiga juga menilai hal yang sama, adanya perhatian atau identifikasi pada fenomena riil yang ada di lapangan;

*Pertimbangan utamanya tentu kondisi riil madrasah. Kalau ruang kelas tidak cukup atau guru kurang, itu pasti jadi prioritas. Selain itu, kami juga melihat kebutuhan siswa, seperti alat tulis, buku pelajaran, atau kegiatan ekstrakurikuler. Tapi sayangnya, banyak kebutuhan ini yang belum bisa terpenuhi karena keterbatasan anggaran.*

---

<sup>22</sup> Siregar, "Model Komunikasi Pemasaran Organisasi Kemasyarakatan Muhammadiyah Kota Medan Dalam Membangun Brand Image Organisasi."

Jawaban wawancara ini memberikan gambaran tentang bagaimana prioritas dalam kebijakan pendidikan madrasah ditentukan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Pendekatan yang mengutamakan kondisi riil menunjukkan bahwa pihak yang bertanggung jawab berupaya untuk memastikan bahwa kebijakan benar-benar menyentuh aspek-aspek yang paling mendesak dan relevan. Dalam hal ini, ruang kelas yang tidak mencukupi atau kekurangan tenaga pengajar menjadi perhatian utama karena keduanya adalah elemen mendasar untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif.

Perhatian juga diberikan pada kebutuhan siswa, seperti penyediaan alat tulis, buku pelajaran, dan kegiatan ekstrakurikuler. Fokus pada kebutuhan siswa mencerminkan kesadaran akan pentingnya mendukung proses pembelajaran yang holistik, di mana siswa tidak hanya belajar dari buku teks tetapi juga dari pengalaman kegiatan tambahan yang mendukung pengembangan keterampilan sosial dan karakter mereka. Hal ini mencerminkan pendekatan pendidikan yang lebih inklusif dan berpusat pada siswa.<sup>23</sup>

Upaya untuk merespons kebutuhan nyata madrasah dan siswa, keterbatasan anggaran sering kali menjadi penghalang yang signifikan. Tantangan ini menekankan pentingnya perencanaan yang cermat, pengelolaan anggaran yang efisien, serta eksplorasi sumber pendanaan alternatif untuk memastikan bahwa kebutuhan prioritas dapat terpenuhi dan tujuan pendidikan madrasah dapat tercapai. Untuk mengoptimalkan proses tersebut, para informan menyebutkan perlunya pendekatan partisipatif yang melibatkan pemangku kepentingan. seperti yang diungkapkan informan pertama, bahwa;

*Iya, kami mencoba melibatkan kepala madrasah dan komite sekolah dalam proses perencanaan. Tapi, keterlibatan mereka masih terbatas, karena banyak dari mereka yang belum terbiasa dengan diskusi semacam ini. Selain itu, kami juga mengadakan forum musyawarah dengan masyarakat untuk mendengar aspirasi mereka. Tapi ya, jujur saja, partisipasi ini masih perlu ditingkatkan.*

Jawaban wawancara ini menunjukkan adanya niat untuk melibatkan pemangku kepentingan lokal, seperti kepala madrasah, komite sekolah, dan masyarakat, dalam proses perencanaan kebijakan pendidikan. Langkah ini mencerminkan pendekatan partisipatif yang diupayakan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirancang tidak hanya berdasarkan perspektif pihak pembuat kebijakan, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi mereka yang terlibat langsung dalam pendidikan madrasah.

Keterbatasan partisipasi yang diakui dalam jawaban ini menunjukkan adanya hambatan yang perlu diatasi. Kepala madrasah dan komite sekolah, yang seharusnya memiliki peran sentral dalam perencanaan, disebut masih kurang terbiasa dengan proses diskusi atau musyawarah

---

<sup>23</sup> Syafruddin Pohan et al., "Fenomena Lunturnya 3 Makna Kata (Tolong, Maaf Dan Terimakasih) Dalam Etika Komunikasi Di Kota Medan," *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting* 4, no. 1 (2024).

semacam ini. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pengalaman atau pelatihan dalam pengambilan keputusan secara kolektif, serta keterbatasan kapasitas untuk memberikan masukan yang konstruktif dalam perencanaan kebijakan. Kendala ini mencerminkan perlunya pemberdayaan dan pelatihan bagi kepala madrasah dan komite sekolah agar mereka dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses perencanaan.

Partisipasi yang terbatas dapat mengurangi efektivitas kebijakan, karena masukan yang diterima tidak sepenuhnya mewakili kebutuhan dan aspirasi semua pihak yang terdampak. Untuk mengatasi ini, diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan lokal, termasuk pelatihan untuk kepala madrasah dan komite sekolah, serta edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya kontribusi mereka dalam perencanaan kebijakan. Dengan partisipasi yang lebih aktif dan inklusif, proses perencanaan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih relevan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan pendidikan madrasah. Informan kedua juga menyebutkan bahwa:

*Iya, kami coba melibatkan kepala madrasah, guru, dan komite sekolah dalam perencanaan. Tapi, kenyataannya, partisipasi ini masih perlu didorong lebih aktif. Banyak yang merasa tidak percaya diri untuk menyampaikan pendapat atau bingung dengan proses perencanaan ini. Kami juga melibatkan pemerintah daerah, meskipun koordinasinya kadang terkendala perbedaan prioritas.*

Informan mengungkapkan upaya untuk menerapkan pendekatan partisipatif dalam perencanaan pendidikan madrasah, dengan melibatkan berbagai pihak seperti kepala madrasah, guru, komite sekolah, dan pemerintah daerah. Langkah ini mencerminkan kesadaran bahwa proses perencanaan yang inklusif dapat menghasilkan kebijakan yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, wawancara ini juga menyoroti tantangan signifikan dalam mendorong partisipasi yang aktif dan efektif.

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kepercayaan diri dan pemahaman dari pihak-pihak yang dilibatkan, seperti kepala madrasah, guru, dan komite sekolah. Banyak di antara mereka yang merasa bingung atau tidak terbiasa dengan proses perencanaan, sehingga kontribusi mereka dalam diskusi atau pengambilan keputusan menjadi minim. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan kapasitas, di mana pelatihan atau pendampingan yang lebih intensif diperlukan untuk membantu mereka memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam proses tersebut. Dengan meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka, partisipasi dapat menjadi lebih bermakna dan konstruktif.

Koordinasi dengan pemerintah daerah juga menghadapi tantangan akibat perbedaan prioritas. Pemerintah daerah mungkin memiliki agenda yang berbeda atau sumber daya yang terbatas, sehingga sulit untuk sepenuhnya mendukung kebutuhan madrasah. Perbedaan prioritas ini mencerminkan pentingnya menyelaraskan visi antara pemerintah daerah dan pihak madrasah untuk menciptakan kebijakan yang terintegrasi dan berdampak luas.

Meskipun pendekatan partisipatif telah diupayakan, hasilnya belum optimal karena partisipasi masih bersifat pasif dan terbatas. Masalah ini juga mengindikasikan perlunya komunikasi yang lebih baik antara semua pihak yang terlibat, termasuk mekanisme yang memungkinkan mereka untuk menyampaikan pendapat dengan lebih percaya diri dan jelas. Selain itu, adanya forum musyawarah yang terstruktur dapat membantu mengurangi kebingungan dalam proses perencanaan dan mendorong keterlibatan yang lebih besar. Dibutuhkan usaha untuk membangun kapasitas, menciptakan suasana yang mendukung partisipasi aktif, dan menyelaraskan prioritas antara berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, proses perencanaan dapat berjalan lebih inklusif, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan pendidikan madrasah. Guna mengatasi berbagai tantangan dan hambatan yang ada dalam proses identifikasi dan perumusan kebijakan, pihak terkait merancang beberapa strategi yang dapat meminimalisir hambatan tersebut, misal dengan menggandeng mitra yang sesuai, seperti yang diutarakan oleh informan pertama;

*Strateginya itu memanfaatkan bantuan yang ada seefisien mungkin. Selain itu, kami juga mencoba mencari mitra, seperti lembaga swasta atau organisasi sosial, untuk membantu mendukung kebutuhan madrasah. Kami juga mendorong kepala madrasah untuk lebih kreatif dalam memanfaatkan sumber daya yang ada.*

Kutipan di atas menunjukkan adanya pendekatan pragmatis dalam mengatasi keterbatasan sumber daya yang sering dihadapi madrasah. Dengan memanfaatkan bantuan yang tersedia secara efisien, pihak terkait berusaha memastikan bahwa kebutuhan prioritas dapat terpenuhi meskipun dengan anggaran atau sumber daya yang terbatas. Pendekatan ini menekankan pentingnya pengelolaan yang baik dan prioritas yang tepat dalam penggunaan bantuan, sehingga dampaknya dapat dirasakan secara optimal oleh madrasah.

Mendorong kepala madrasah untuk lebih kreatif dalam memanfaatkan sumber daya yang ada adalah langkah strategis lainnya. Hal ini menunjukkan upaya untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan di tingkat madrasah, sehingga mereka dapat mengoptimalkan potensi lokal dan memanfaatkan aset yang ada secara inovatif. Misalnya, kepala madrasah dapat mencari cara untuk memaksimalkan penggunaan fasilitas sekolah, menjalin kerja sama dengan komunitas, atau mengadakan program mandiri yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kreativitas dalam pengelolaan ini tidak hanya membantu mengatasi keterbatasan, tetapi juga dapat meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan program di madrasah. Sementara itu informan ketiga mengoptimalkan proses pemberdayaan sumber daya, seperti yang ia utarakan:

*Strategi kami lebih banyak bersifat mandiri. Misalnya, kami coba ajak guru dan siswa untuk memanfaatkan barang bekas sebagai bahan belajar atau alat praktik. Selain itu, kami juga mulai menggalang dana dari masyarakat untuk kebutuhan mendesak, seperti perbaikan kecil pada fasilitas. Kami sadar, kalau hanya mengandalkan bantuan dari pusat, prosesnya akan terlalu lama.*

Madrasah berupaya untuk menghadapi keterbatasan sumber daya dengan mengembangkan strategi mandiri yang melibatkan kreativitas dan partisipasi komunitas. Upaya ini mencerminkan adaptasi terhadap situasi di mana bantuan dari pusat sering kali membutuhkan waktu yang lama atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak.

Pemanfaatan barang bekas sebagai bahan belajar atau alat praktik adalah contoh konkret dari pendekatan inovatif yang memanfaatkan apa yang tersedia di lingkungan sekitar. Pendekatan ini tidak hanya mengatasi masalah keterbatasan sumber daya, tetapi juga mengajarkan siswa dan guru tentang nilai kreativitas, keberlanjutan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Strategi ini mencerminkan konsep pendidikan berbasis komunitas, di mana sumber daya lokal digunakan untuk mendukung proses pembelajaran.

Penggalangan dana dari masyarakat untuk kebutuhan mendesak, seperti perbaikan kecil fasilitas, menunjukkan adanya inisiatif untuk memberdayakan komunitas lokal. Pendekatan ini mengakui bahwa masyarakat adalah bagian integral dari ekosistem pendidikan, dan kontribusi mereka dapat menjadi solusi praktis untuk mengatasi keterbatasan dana. Namun, keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap madrasah, serta kemampuan pihak sekolah untuk mengelola dana secara transparan dan efektif.

Kesadaran bahwa ketergantungan pada bantuan pusat sering kali tidak memadai atau memakan waktu terlalu lama mencerminkan realitas yang dihadapi banyak institusi pendidikan, terutama di daerah terpencil. Hal ini menegaskan pentingnya kemandirian dalam pengelolaan sumber daya, yang dapat mempercepat penyelesaian masalah dan meningkatkan efisiensi operasional madrasah. Namun, strategi ini juga membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan kemampuan untuk memotivasi semua pihak, termasuk guru, siswa, dan masyarakat, agar terlibat secara aktif.

Jawaban ini menggambarkan upaya madrasah untuk mengatasi tantangan dengan pendekatan yang kreatif dan partisipatif. Strategi mandiri ini tidak hanya membantu mengatasi masalah jangka pendek, tetapi juga dapat memperkuat rasa kebersamaan dan tanggung jawab di antara semua pemangku kepentingan. Namun, untuk memastikan keberlanjutan, madrasah perlu terus memperkuat kapasitas internal dan membangun hubungan yang lebih erat dengan komunitas lokal. Dengan pendekatan ini, madrasah dapat menjadi model bagi lembaga pendidikan lain yang menghadapi tantangan serupa.

Kebijakan pengembangan pendidikan madrasah oleh Kementerian Agama Kota Gunungsitoli mencerminkan upaya strategis dalam menjawab tantangan lokal yang unik. Dengan pendekatan yang mengutamakan identifikasi kebutuhan nyata di lapangan, perencanaan kebijakan ini berusaha untuk menciptakan solusi yang relevan dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pendidikan. Pendekatan berbasis data, pemanfaatan sumber daya lokal, dan pelibatan

berbagai pemangku kepentingan menjadi fondasi penting dalam memastikan kebijakan ini berjalan efektif, meskipun masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan anggaran dan kebijakan pusat yang kurang fleksibel.<sup>24</sup>

Tantangan seperti ketidaksesuaian data, keterbatasan partisipasi, dan hambatan anggaran menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara tingkat pusat dan daerah, serta perlunya inovasi dalam pengelolaan pendidikan. Pendekatan partisipatif yang melibatkan kepala madrasah, komite sekolah, dan masyarakat memberikan potensi besar untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan spesifik madrasah. Namun, keberhasilan kebijakan ini membutuhkan penguatan kapasitas para pemangku kepentingan, transparansi dalam pengelolaan anggaran, dan integrasi teknologi untuk mendukung proses pengumpulan data dan evaluasi secara real-time.<sup>25</sup>

Dengan strategi yang adaptif dan berbasis pada kebutuhan lokal, kebijakan ini memiliki peluang untuk mewujudkan pendidikan madrasah yang berkualitas, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Meskipun perjalanan menuju implementasi yang ideal masih panjang, upaya yang terus-menerus untuk memperbaiki mekanisme perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dapat menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa madrasah di Gunungsitoli mampu memberikan pendidikan yang optimal bagi para siswa dan turut mendukung pengembangan sosial, ekonomi, dan moral di wilayah tersebut.<sup>26</sup>

## KESIMPULAN

Perencanaan kebijakan Kementerian Agama Kota Gunungsitoli dalam pengembangan pendidikan madrasah menunjukkan upaya yang terorganisir dan adaptif terhadap tantangan lokal yang kompleks. Proses perencanaan ini dimulai dengan identifikasi kebutuhan langsung di lapangan, yang melibatkan masukan dari kepala madrasah, guru, dan masyarakat. Evaluasi kondisi nyata madrasah menjadi dasar untuk menentukan prioritas kebijakan yang lebih relevan dengan situasi di lapangan. Namun, meskipun pendekatan ini berfokus pada kebutuhan lokal, kebijakan yang diterapkan di tingkat pusat sering kali bersifat seragam dan tidak sepenuhnya sesuai dengan karakteristik unik Gunungsitoli, seperti kondisi geografis yang sulit dijangkau dan keterbatasan infrastruktur. Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam proses perencanaan adalah ketidakakuratan dan keterlambatan dalam pembaruan data, baik terkait jumlah siswa maupun kondisi fasilitas madrasah. Ketidaksesuaian data ini menghambat efektivitas perencanaan dan

---

<sup>24</sup> Dwi Noviani and Ani Nafisah, "Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Kurikulum Merdeka," *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, no. 2 (2022).

<sup>25</sup> Muhammad Naguib Al-Attas, "*Konsep Pendidikan Dalam Islam*," (Bandung: Mizan, 1987).

<sup>26</sup> Saima Putri Siregar, "Strategi Guru Dalam Membina Karakter Santri Di Madrasah Tsanawiyah Yayasan Pendidikan Daarul Mukhlisih Bahab Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara" (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2024).

pengambilan keputusan. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan besar dalam merealisasikan kebijakan, mengingat banyak kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi, seperti peningkatan fasilitas fisik dan penyediaan sumber daya pendidikan lainnya. Meskipun begitu, pihak terkait telah mengupayakan berbagai strategi untuk mengatasi tantangan tersebut.

Madrasah-madrasah yang berada di daerah terpencil harus berjuang dengan keterbatasan akses, yang tidak hanya mempersulit distribusi bantuan, tetapi juga menghambat pelaksanaan program-program seperti pelatihan guru. Pada akhirnya, beban untuk memastikan kebijakan itu berhasil sering kali jatuh di pundak kepala madrasah, guru, dan masyarakat, yang harus berjuang dengan segala keterbatasan. Narasi ini bukan hanya tentang masalah, tetapi juga tentang semangat untuk terus mencoba, meskipun jalan yang harus dilalui sangat berat. mBagi madrasah-madrasah di Gunungsitoli, keberhasilan kebijakan bukan hanya soal program yang dirancang dari atas, tetapi bagaimana mereka sendiri berusaha mencari solusi untuk mengatasi keterbatasan. Diperlukan peranmasyarakat untuk membantu perbaikan kecil di madrasah atau mencari cara kreatif untuk menjalankan program dengan sumber daya yang ada. Namun, tanpa dukungan yang lebih konkret dari pihak yang berwenang, usaha ini hanya seperti tambalan sementara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Attas, Muhammad Naguib. *“Konsep Pendidikan Dalam Islam.”* Bandung: Mizan. 1987.
- Alhaddad, Muhammad Roihan. “Konsep Pendidikan Multikultural Dan Pendidikan Inklusif.” *Jurnal Tarbiyah Islamiyah* 5, no. 1 (2020).
- Bhatti, Muhammad Awais, Mansour Alyahya, Ahmed Abdulaziz Alshiha, and Ariff Syah Juhari. “Factors Affecting Organizational Identity in the Tourism Industry: Role of Marketing Campaigns and Vision 2030.” *International Journal of EBusiness and EGovernment Studies* 14, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.34109/ijebeq.202214114>.
- Darna, I Wayan. *Pendidikan Karakter Tanggung Jawab Siapa?: Pentingnya Sinergi Rumah, Sekolah Dan Masyarakat Demi Membentuk Karakter Siswa.* Nilacakra, 2023.
- Hamdani, Hamid, and Beni Ahmad Saebani. “Pendidikan Karakter Perspektif Islam.” *Bandung: Pustaka Setia*, 2013.
- Harun, R. *Evolusi Kementerian Agama: Peran Dalam Pembangunan Bangsa Indonesia.* Jakarta: Pustaka Nusantara, 2014.
- Hill P., M. Hupe. *Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice.* London: Sage, 2002.
- Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik. “Pedoman Operasional Evaluasi Diri Madrasah V.1.0,” 2020. <https://madrasahreform.kemenag.go.id/dokumen/edm.pdf>.
- Lali, K, and A Chakor. “Marketing Based on the Digitalization of Customer Relations: A Priority Orientation for Better Management of Companies’ Financial Resources.” In *Lecture Notes in Networks and Systems*, edited by Farhaoui Y., Hussain A., Saba T., Taherdoost H., and Verma A. Polydisciplinary Faculty, Moulay Ismail University, Meknès/Errachidia, Morocco: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2024.

[https://doi.org/10.1007/978-3-031-48465-0\\_68](https://doi.org/10.1007/978-3-031-48465-0_68).

- Mantulenko, V V, and A D Kornilova. "Development of Additional Professional Education: Marketing Tools for Information Transparency." In *Lecture Notes in Civil Engineering*, edited by Mantulenko V. Samara State University of Economics, Samara, Russian Federation: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2023. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-38122-5\\_48](https://doi.org/10.1007/978-3-031-38122-5_48).
- Moleong, Lexy J, and Tjun Surjaman. "Metodologi Penelitian Kualitatif," Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Munjiah, Munjiah. "Pengaruh Budaya Sekolah Terhadap Perilaku Bullying Pada Siswa Madrasah Tsanawiyah Hasyim Asy'ari Kota Batu." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.
- Noviani, Dwi, and Ani Nafisah. "Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Kurikulum Merdeka." *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, no. 2 (2022).
- Noviantika, Noviantika. "Pelaksanaan Bina IMTAQ Dzikir Dalam Meningkatkan Keimanan Dan Ketakwaan Peserta Didik Di SD Inpres Bumi Bahari Palu Barat." Universitas Islam Negeri Negeri Datokarama Palu, 2024.
- Pohan, Syafruddin, Annisa Ariftha, All Rizky Ramadhan, and Ahmad Saleh Afif. "Fenomena Luntarnya 3 Makna Kata (Tolong, Maaf Dan Terimakasih) Dalam Etika Komunikasi Di Kota Medan." *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting* 4, no. 1 (2024).
- Rahmadani, Dessy, Yenni Samri, and Juliati Nasution. "Strategi Peningkatan Jumlah Muzakki Di Lazis Muhammadiyah Kota Medan." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021).
- Rahmat, Sidiq. *Manajemen Sumber Daya Manusia Bidang Pendidikan: Teori Dan Praktek*. Edu Publisher, 2021.
- Shabrina, An Nisaa, Achmad Fauzi, Adi Wibowo Noor Fikri, Hanny Novita Ramadhan, Muhammad Choirudin, Muhammad Reyhan Riyandito, Muthia Novita Ramadhani, and Putri Aprilia Hikayatuni'mah. "Peran Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik Dalam Menciptakan Keunggulan Kompetitif Perusahaan." *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan (JIMT)*. 4, no. 3 (2023).
- Siregar, All Rizky Ramadhan. "Model Komunikasi Pemasaran Organisasi Kemasyarakatan Muhammadiyah Kota Medan Dalam Membangun Brand Image Organisasi." Universitas Sumatera Utara, 2025.
- Siregar, Saima Putri. "Strategi Guru Dalam Membina Karakter Santri Di Madrasah Tsanawiyah Yayasan Pendidikan Daarul Mukhlisin Bahab Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara." UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2024.
- Siregar, Tasya Amelia Putri, Salminawati Salminawati, Muhammad Irfansyah Siregar, and Indah Widya Jaya Putri Nasution. "Kriteria Kebenaran Ilmiah Dalam Perspektif Barat Dan Islam." *Dirosat: Journal of Islamic Studies* 8, no. 1 (2023).
- Smith, Kevin B, and Christopher W Larimer. *The Public Policy Theory Primer*. Routledge, 2018.